

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan salah satu instrument dalam praktik demokrasi. Melalui pemilu yang diselenggarakan secara luber dan jurdil, maka secara umum rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintah dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan yang telah di sepakati bersama. Pemilu dilakukan dimana pemilih memilih orang-orang untuk mengisi posisi politik tertentu (Budiardjo, 2008). Pemilu ialah sebuah demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpin dan menentukan arah dalam menentukan kebijakan politik dalam 5 tahun mendatang pemilu juga merupakan proses pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik yang dijelaskan pada undang- undang No 39 Tahun 1999 tentang Pemilihan umum (UU No 39 tahun 1999).

Berbicara proses pemilu sangat tidak terlepas dari dari kata elektabilitas, tentu hal ini penting dan sangat jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada setiap kontesasi politik karena semakin tinggi elektabilitas seorang kandidat ataupun partai tentu akan semakin mudah untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Inti dari elektabilitas politik adalah tentang bagaimana suatu kandidat atau partai politik dapat mempengaruhi pemilih dan membuat mereka tertarik pada visi maupun program-program yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi elektabilitas ini seperti karakter kandidat atau partai, rekam jejak dan juga kemampuan dalam berkomunikasi dengan para pemilih.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Hasanuddin, 2022). Partai politik merupakan sebuah organisasi yang menjadi keharusan dalam kehidupan politik yang demokratis. Sebagai salah satu organisasi yang terorganisir, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan ruang untuk diskusi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana untuk pemilihan kepemimpinan politik secara sah (*legitimasi*) dan damai.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada 4 Juli 1927 oleh Sukarno. PNI kemudian mengalami beberapa perubahan dan penggabungan dengan partai-partai lain, termasuk Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik. Penggabungan ini secara resmi membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

PDI mengalami banyak konflik internal dan intervensi dari pemerintah terutama selama era Orde Baru di bawah Soeharto. Pada Kongres Nasional 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI tetapi pemerintah tidak mengakui hasil tersebut dan mendukung Budi Harjono sebagai pemimpin alternatif. Ketegangan ini memuncak pada Kongres di Medan pada tahun 1996 yang berujung pada kerusuhan besar yang dikenal sebagai Peristiwa

27 Juli (Kudatuli) ketika pendukung Megawati berkonflik dengan pendukung Suryadi yang didukung pemerintah. Setelah kerusuhan tersebut dan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Megawati mendeklarasikan pembentukan PDIP dengan menambahkan sufiks "Perjuangan" untuk membedakan partainya dari fraksi yang didukung pemerintah. Pada 1 Februari 1999, nama resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pemilu tahun 1999, partai PDI-Perjuangan mendapat posisi pertama perolehan suara terbanyak secara nasional dengan perolehan 35.689.073 (33,74%) dan dengan perolehan 153 kursi, Pemilu tahun 2004 PDI-Perjuangan mengalami penurunan perolehan suara menjadi 21.026.629 (18,53%) dengan perolehan kursi sebanyak 109. Penurunan perolehan suara yang terjadi pada PDI-Perjuangan tidak hanya terjadi pada Pemilihan umum tahun 2004 tetapi juga pada pemilu tahun 2009, penurunan pada pemilu tahun 2009 cukup menjadi perhatian yakni dengan perolehan suara sebanyak 14.600.091(14,03%) dan perolehan sebanyak 94 kursi (Kpu.go.id). Namun pada pemilu tahun 2019, PDI-Perjuangan berhasil merebut kembali perolehan suara sebanyak 27.053.961 (19,33%) dengan perolehan kursi sebanyak 128 kursi. Pemilu tahun 2024 PDI-Perjuangan memperoleh 25.387.279 suara dengan perolehan 110 kursi secara tingkat nasional .

Table 1.1 Perolehan Kursi Partai PDI-P Di Kabupaten Dairi Pada Tahun 2019-2024

2019 - 2024	2024 - 2029
5 Kursi	7 kursi

Sumber: KPU Dairi

Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Dairi, PDI-P berhasil meraih 5 kursi dengan jumlah 12.472 suara sah di DPRD kabupaten Dairi. Perolehan ini mencerminkan dukungan yang besar dari masyarakat Dairi terhadap partai tersebut pada pemilu tersebut. Meskipun menghadapi persaingan ketat dengan partai politik lainnya, PDI-P mampu menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya di daerah ini. Namun, pada Pileg 2024, PDI-P tidak hanya mampu mempertahankan jumlah kursinya tetapi juga berhasil meningkatkan jumlah kursi yang diperoleh. PDI-P meraih 7 kursi dengan jumlah total 35.624 perolehan suara sah Di DPRD.

Perolehan kursi di DPRD Dairi menunjukkan bahwa partai tetap memiliki pengaruh yang besar di tengah masyarakat, meskipun ada tantangan persaingan dari partai-partai lain. Hal ini menunjukkan bahwa PDI-P tidak hanya berhasil mempertahankan kepercayaan masyarakat tetapi juga mampu memaksimalkan potensi suara di daerah dengan memanfaatkan basis massa yang kuat.

Pemilihan umum legislatif di Indonesia menjadi momentum krusial dalam perjalanan demokrasi negara ini. Setiap lima tahun sekali, rakyat Indonesia berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya kepada partai politik yang mereka percayai dapat mewakili aspirasi dan kepentingan mereka di tingkat legislatif. Di antara berbagai partai politik yang bertarung dalam arena politik Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memegang peranan penting dalam peta politik nasional. Dengan sejarah yang panjang dan pengaruh yang

kuat, PDIP selalu menjadi subjek perhatian utama dalam setiap pemilihan umum. Tahun 2024 bukanlah pengecualian.

Pemilihan legislatif diharapkan menjadi panggung PDIP untuk menunjukkan kekuatan dan strategi politiknya yang telah teruji selama bertahun-tahun. Tahun 2024 menjadi momen yang menarik untuk melihat bagaimana PDIP menghadapi dan mengatasi tantangan dalam pemilu legislatif. Dengan latar belakang politik yang kompleks, beragamnya isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat, dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, strategi kemenangan PDIP.

Table 1.2 Rekapitulasi daftar pemilih tetap (dpt) kabupaten dairi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN DAIRI PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sidikalang	11	155	19.122	20.138	39.260
2	Sumbul	19	126	16.137	16.549	32.686
3	Tigalingga	14	81	8.732	9.287	18.019
4	Siempat Nempu	13	62	7.405	7.687	15.092
5	Silima Punga-Punga	16	46	5.178	5.517	10.695
6	Tanah Pinem	19	74	8.319	8.499	16.818
7	Siempat Nempu Hulu	12	60	7.506	7.506	15.012
8	Siempat Nempu Hilir	10	43	4.310	4.281	8.591
9	Pegagan Hilir	13	56	6.353	6.507	12.860
10	Parbuluan	11	72	9.050	9.237	18.287
11	Lae Parira	9	46	5.342	5.563	10.905
12	Gunung Sتمبر	8	33	3.943	4.030	7.973
13	Berampu	5	26	3.356	3.338	6.694
14	Silahisabungan	5	18	2.063	2.173	4.236
15	Sitinjo	4	40	5.077	5.015	10.092
TOTAL		169	938	111.893	115.327	227.220

Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Dairi No 247 Tahun 2023 (Freddy, 2023).

Pada Pemilu tahun 2024-2029 di Kabupaten Dairi, PDI-P memenangkan kontestasi politik dengan memperoleh sebanyak 35.624 suara dari 227.220 Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang berarti memperoleh 15.66% dari total perolehan suara. Berdasarkan fenomena diatas dengan meningkatnya kursi PDI Perjuangan pada pemilihan legislatif tahun 2024, peneliti tertarik mengangkat judul Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam meningkatkan perolehan kursi pada pemilihan legislatif di DPRD kabupaten Dairi tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam meningkatkan perolehan kursi pada pemilu di DPRD Kabupaten Dairi tahun 2024?
2. Apa tantangan yang dihadapi PDI-P dalam meningkatkan perolehan kursi pada pemilu di DPRD Kabupaten Dairi tahun 2024?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Strategi digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam meningkatkan perolehan kursi pada pemilu Di DPRD Kabupaten Dairi tahun 2024.
2. Tantangan yang dihadapi PDI-P dalam meningkatkan perolehan kursi pada pemilu Di DPRD Kabupaten Dairi tahun 2024.

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk melihat strategi digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam meningkatkan perolehan kursi pada pemilu di DPRD Kabupaten Dairi tahun 2024.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PDI-P dalam meningkatkan perolehan kursi pada pemilu di DPRD Kabupaten Dairi tahun 2024.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dan bagi pembaca untuk menambah pengetahuan tentang PDIP, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memperluas wawasan mengenai strategi PDIP dalam meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Dairi pada Pileg 2024.